

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta. (2003). *Teknik Pengumpulan data dan Analisa data Kualitatif*. Bogor: Disampaikan pada pelatihan Metode Kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Bogor, 27 Februari 2003.
- Bambang Supomo, I. N. (2009). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen* (Edisi Pertama ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Gie, T. L. (2009). *Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Nurcahaya.
- Huberman, M. d. (1992). *Analisis data Kualitatif*. (T. R. Rosidi, Penerj.) Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kristanto, V. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Liputan6.com. (2021, Desember 29). Survei Ombudsman, Hanya 9 Pemda di Jatim Raih Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
- Martoyo, S. (2008). *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sayukani. (2004). *Otonomi dalam kesatuan*. Jakarta: Yogya Pustaka.
- Sekaran, U. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solihin, I. (2009). *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (26 ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Surmayadi, N. I. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Undang-undang Nomor 25 (2009).
- Undang-Undang Nomor 37 , Pasal 2 (2008).
- Undang-undang Nomor 37, Pasal 1 (2008).
- Usman, N. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada.
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifka, D. (2020). *Responsivitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia*

- Perwakilan Provinsi Aceh Dalam Menangani Laporan Maladministrasi.*
- Asrori, M. (2013). Pengertian, tujuan dan ruang lingkup strategi pembelajaran. *Madrasah*, 05(50), 163–188.
- Lestari, T. (2017). *Peran Dan Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (Ori) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik (Study Kajian Pengawasan Terhadap Implementasi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Di Kota Makassar) SKRIPSI Diajukan Sebagai Sal.*
- Lili, R. (2020). Masalah Reformasi Birokrasi. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 26(28).
- M.Nazir. (1999). *Metode Penelitian*. 4(1), 1–23.
- Nacional, C. (2000). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. *Journal of Petrology*, 369
- Prayudi. (2014). Dinamika dalam penerapannya di setiap kurun waktu sistem Sehubungan dengan. *Kajian*, 19(4), 293–310.
- Putu, N., Prabawati, A., Nyoman, N., Pascarani, D., & Supriyanti, N. W. (n.d.). *Peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Denpasar)*.
- TAP MPR NOMOR VIII TAHUN 2001. (2004). 1–4.
- TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998. (n.d.).
- UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf. (n.d.).
- UU Nomor 28 Tahun 1999. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, (1), 1–5.
- Zara, Z., & Zara, Z. I. (2008). UU No 37 Tahun 2008.